



Implementasi Pendidikan Inklusi dalam *Setting* Sekolah Menengah Atas di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat

Notonagoro Sabdo Gusti

Studi Disabilitas dan Pendidikan Inklusi, Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Corresponding Author. Email: Notonagoro3@gmail.com

Abstract: This study aims to describe the implementation of inclusive education in high school settings in the city of Mataram. This research used a qualitative approach with a case study method carried out to see and observe a program, activity, event, or group of individuals at SMAN 6 Mataram. Data collection techniques used interviews and observation. Data analysis technique used three stages; data reduction, data exposure, and conclusion drawing. The research results showed that the inclusive education at SMAN 6 Mataram was well implemented because the school had previously carried out socialization to all teachers and parents. In addition, the school provided access for all students with disabilities with individual or additional learning, curriculum modifications for all disabled people, learning facilities, socialization of learning braille books for teachers and assisting students with disabilities in exams. The obstacles experienced were the lack of direct support from the government, professionals, and learning problems such as mathematics, arts and culture, physical education, and crafts.

Abstrak: Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan implementasi pendidikan Inklusi dalam setting Sekolah Menengah Atas di Kota Mataram. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang dilakukan untuk melihat dan mengamati suatu program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu di SMAN 6 Mataram. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga tahapan yakni reduksi data, pemaparan data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian yaitu implementasi pendidikan inklusi di SMAN 6 Mataram berjalan dengan baik dikarenakan sekolah telah melakukan sosialisasi kepada seluruh guru dan orang tua. Selain itu, sekolah menyediakan akses bagi seluruh siswa difabel dengan adanya pembelajaran individu atau tambahan, modifikasi kurikulum untuk seluruh difabel, fasilitas belajar, sosialisasi pembelajaran buku braille untuk guru dan juga pemberian pendampingan kepada siswa difabel dalam ujian. Adapun kendala yang dialami adalah kurangnya dukungan secara langsung dari pemerintah, tenaga profesional, dan juga masalah pembelajaran seperti matematika, seni budaya, penjaskes, dan juga prakarya.

Article History

Received: 26-01-2021
Revised: 26-06-2021
Accepted: 31-07-2021
Published: 07-09-2021

Key Words:

Implementation, Inclusive Education, Senior High School.

Sejarah Artikel

Diterima: 26-01-2021
Direvisi: 26-06-2021
Disetujui: 31-07-2021
Diterbitkan: 07-09-2021

Kata Kunci:

Implementasi, Pendidikan Inklusi, Sekolah Menengah Atas.

How to Cite: Gusti, N. (2021). Implementasi Pendidikan Inklusi dalam Setting Sekolah Menengah Atas di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran*, 7(3), 532-544. doi:<https://doi.org/10.33394/jk.v7i3.3469>



<https://doi.org/10.33394/jk.v7i3.3469>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



Pendahuluan

Pendidikan yang bermutu merupakan hal yang utama dalam membangun negara yang berkembang dalam bersaing dengan negara lain untuk menjadikan dirinya sebagai negara maju. Pemerataan pendidikan pun sangat dipandang penting karena merupakan tujuan sebuah negara yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk mencerdaskan



kehidupan bangsa (Dalyono & Agustina, 2016) dan pendidikan merupakan hak yang bersifat fundamental bagi setiap manusia (Firman, 2020). Secara tersirat negara berkewajiban dalam memberikan hak untuk seluruh warga negara dalam menikmati pendidikan yang layak tanpa terkecuali yang tergolong sebagai penyandang disabilitas. Setiap anak harus diperlakukan sama seperti kita memperlakukan orang dewasa dan melayani sesuai kebutuhannya (Afifah & Hadi, 2018). Para pendidik perlu memperhatikan kebutuhan individu anak didiknya, termasuk proses belajar Anak Berkebutuhan Khusus (selanjutnya disingkat ABK) karena perkembangan yang terjadi pada masa pendidikan mereka akan membentuk pola tertentu dalam setiap tahap kehidupan yang tidak saja untuk perilaku aktual semata, namun juga untuk pertumbuhan dan penyesuaian yang akan datang (Lukitasari et al., 2017).

Pendidikan inklusi adalah suatu sistem layanan pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus di kelas normal bersama dengan teman sebayanya. Sehingga, pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya (Kusnia, 2019). Pendidikan inklusi hadir sebagai salah satu pendidikan alternatif yang dapat mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia dan merupakan pola layanan pendidikan yang memberikan ruang kepada ABK untuk menerima pendidikan di sekolah-sekolah reguler bersama teman sebayanya, dimana sekolah reguler memberi wadah kepada para peserta didik di kelas yang sama dari berbagai macam karakteristik dan perbedaan kecerdasan sehingga para siswa dapat dapat mengenyam pendidikan secara merata.

Pendidikan inklusi menjadi salah satu bentuk pelaksanaan pendidikan tanpa diskriminasi. Melalui implementasi pendidikan inklusi, diharapkan dapat menciptakan generasi bangsa yang dapat berpikir secara inklusi terhadap segala bentuk perbedaan (Saadati & Sadli, 2019). Konsep inklusi yang memberikan kesempatan peserta didik berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan peserta didik tidak serta merta menggabungkan mereka dalam satu kelas ataupun dalam satu sekolah (Suparno et al., 2019; Suparno et al., 2019).

Berkaitan dengan pendidikan inklusi, Implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia hingga saat ini belum mampu menjangkau semua anak usia sekolah untuk mengakses pendidikan secara memadai lebih khusus anak dengan penyandang disabilitas. Fakta membuktikan bahwa penyandang disabilitas telah lama termarginalkan dari akses pendidikan yang merupakan salah satu sumberdaya penting dalam membentuk sumber daya manusia. Salah satu dampak dari banyaknya penyandang disabilitas yang tidak memperoleh akses terhadap pendidikan tinggi adalah rendahnya kapital manusia penyandang disabilitas (Michael, 2020).

Saat ini Indonesia belum memiliki data yang akurat dan spesifik tentang berapa banyak jumlah anak penyandang disabilitas. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, jumlah anak berkebutuhan khusus yang berhasil didata terdapat sekitar 1,5 juta jiwa. Namun secara umum, PBB memperkirakan bahwa paling sedikit terdapat 10 persen anak usia sekolah yang memiliki kebutuhan khusus. Di Indonesia, jumlah anak usia sekolah yang berusia 5-14 tahun terdapat sebanyak 42,8 juta jiwa. Apabila mengikuti perkiraan tersebut, maka diperkirakan terdapat kurang lebih 4,2 juta anak Indonesia yang berkebutuhan khusus. Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Indonesia ternyata cukup besar (Darma & Rusyidi, 2015), dimana yang tercatat menempuh pendidikan di sekolah luar biasa (SLB) mencapai 144.621 siswa pada tahun ajaran 2020/2021. Dari jumlah tersebut, sebanyak 82.326 anak berkebutuhan khusus berada di jenjang pendidikan sekolah dasar (SD), sebanyak 36.884 anak berkebutuhan khusus tengah



mengenyam pendidikan di sekolah menengah pertama (SMP) dan ada 25.411 anak berkebutuhan khusus yang tengah menempuh Sekolah Menengah Atas (SMA) (Statistik, 2020). Secara khusus salah satu kebijakan pendidikan yang dikeluarkan pemerintah melalui Kemendikbud Republik Indonesia, dalam Peraturan Menteri No. 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusi (Kemendiknas, 2010). Hal ini mengisyaratkan bahwa pemerintah ingin menerapkan pendidikan inklusi di setiap jenjang pendidikan baik itu pendidikan dasar, menengah, atas, maupun perguruan tinggi.

Konsep dasar pendidikan inklusi dimaksudkan sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang dekat dengan tempat tinggalnya. Ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan inklusi meliputi pendidikan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Kemendiknas, 2010). Penelitian tentang program inklusi di Indonesia masih sangat terbatas, padahal pendidikan inklusi merupakan pendidikan alternatif sebagai bagian dari proses menghilangkan pikiran dan perilaku diskriminasi terhadap penyandang disabilitas agar semua anak dapat menikmati pendidikan di sekolah manapun tanpa terkecuali. Hal ini dikarenakan masa tersebut merupakan momentum yang terbaik untuk membantu mengoptimalkan perkembangan sosial, emosi, dan kognisi anak disabilitas maupun non-disabilitas (Alfian, 2013).

Banyak penelitian yang telah mengkaji mengenai implementasi pendidikan inklusi. Tema-tema penelitian tersebut juga bervariasi. Misalnya, penelitian mengenai implementasi pendidikan inklusi pada sekolah dasar islam terpadu Al-Firdaus Banjarmasin (Barsihanor & Anindia Rosyida, 2019); riset tentang sistem "SMART" dalam implementasi pendidikan inklusi ("Sistem 'SMART' Dalam Implementasi Pendidikan Inklusi," 2005); tulisan yang membahas manajemen pendidikan inklusi di Aceh (Wati, 2014); kemudian tulisan yang membahas tentang implementasi manajemen pendidikan inklusi di PAUD inklusi Saymara Kartasura (Shofa, 2018); serta artikel yang mengkaji tentang identifikasi dan implementasi pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar Sumatra Barat (Angreni & Sari, 2020). Akan tetapi sedikit sekali yang menyingung mengenai implementasi pendidikan inklusi setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Setidaknya ada dua artikel yang ditemukan yang mengkaji tentang implementasi pendidikan inklusi. Artikel yang membahas tentang implementasi pendidikan inklusi diantaranya adalah artikel tentang pendidikan inklusi di perguruan tinggi (Sastradiharja et al., 2020) dan artikel yang membahas implementasi pendidikan inklusi di Kota Kediri: studi kasus di SMP YBPK Kediri (Fathimatul Zahrol F, 2015). Kedua riset tersebut berfokus pada implementasi pendidikan inklusi pada pendidikan menengah. Sedangkan tulisan-tulisan yang fokus membahas tentang implementasi pendidikan inklusi di tingkat pendidikan menengah atas belum ditemukan.

Dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan perihal tentang jaminan pendidikan bagi penyandang disabilitas. Begitu pula dalam kebijakan peraturan gubernur NTB Nomor 2 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pendidikan Inklusi dimana, seluruh sekolah yang ada di Kabupaten atau Kota di provinsi Nusa Tenggara Barat berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi. Selain itu, dalam pasal 1 ayat 8 menyebutkan bahwa pendidikan inklusi diharapkan dapat memberikan peran kepada semua peserta didik dalam satuan iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang, sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental, sehingga sekolah merupakan miniatur masyarakat (NTB, 2016).



Ditegaskan kembali dalam peraturan daerah kota Mataram No 6 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dijelaskan dalam pasal 1 ayat 10 menerangkan bahwa Pendidikan Inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya (NTB, 2016). Dari seluruh peraturan tersebut memberikan pemahaman bahwa sekolah harus menjadi rumah bagi seluruh elemen masyarakat yang ingin mengenyam pendidikan tanpa terkecuali. Salah satu sekolah rujukan pendidikan inklusi di kota Mataram adalah SMAN 6 Mataram, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. Sekolah ini menjadi sekolah inklusi sejak tahun ajaran 2004/2005 dengan adanya peserta didik disabilitas netra dari SLB A YPPN yang jaraknya berdekatan dengan sekolah kemudian mendaftarkan diri karena ingin merasakan bersekolah di sekolah umum. Masuknya peserta didik netrapun tidak lain dibantu dengan koordinasi dari pihak sekolah dengan pihak SLB dengan menanyakan kesiapan dari siswanya. Awal mulanya peserta didik netra merasakan kesulitan dalam mengikuti pembelajaran, akan tetapi seiring berjalannya waktu hambatan itu tidak dirasakan lagi dikarenakan ada akses untuk mengikuti pembelajaran ditambah guru yang sudah mengerti kebutuhan dari peserta didik.

SMA Inklusi Mataram menjadi sekolah inklusi bukan karena adanya program dari dinas pendidikan melainkan semuanya berawal secara tidak disengaja disebabkan adanya anak difabel yang melanjutkan pendidikan ke SMAN 6 Mataram. Hingga saat ini banyak difabel yang kesulitan untuk mendapatkan akses mengikuti pendidikan di sekolah umum kota Mataram dikarenakan terbatasnya sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi dengan mengikutsertakan siswa dengan penyandang disabilitas walaupun didalam undang-undang mewajibkan seluruh sekolah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi. Selain itu, permasalahan lain yang terjadi adalah masih terbatasnya akomodasi yang disediakan oleh SMAN 6 Mataram dalam penyelenggaraan pendidikan yang layak bagi siswa difabel.

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan implementasi pendidikan inklusi khususnya SMAN 6 Mataram. Harapannya adalah dengan adanya penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada dinas pendidikan dan pemerintah daerah kota Mataram serta dapat mengkaji lebih dalam untuk meniadakan permasalahan sekolah inklusi di Kota Mataram agar siswa difabel juga mendapatkan akses pendidikan yang baik sebagaimana siswa lainnya. Disisi lain, dengan adanya penelitian ini diharapkan *stakeholder* SMAN 6 Mataram lebih memperhatikan akomodasi yang layak bagi siswa difabel agar tercipta sekolah yang ramah terhadap difabel. Maka dari itu, penelitian ini penting untuk dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan implementasi pendidikan inklusi dalam setting Sekolah Menengah Atas di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Studi kasus merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap suatu program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang terikat oleh tempat, waktu, atau ikatan tertentu. Penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kasus difokuskan pada satu fenomena yang dipilih dan dipahami secara mendalam (Ma'arif, 2017). Responden dalam penelitian ini melibatkan kepala sekolah, guru inklusi, guru mata pelajaran dan guru bimbingan konseling SMAN 6 Mataram. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi. Seluruh responden yang bersedia dan berhasil diwawancarai berjumlah lima orang yang terdiri dari kepala sekolah, satu guru inklusi, dua guru mata



pelajaran, dan satu guru bimbingan konseling. wawancara dilakukan secara tak terstruktur, pertanyaan dan urutannya menyesuaikan kondisi namun tetap menggunakan pedoman wawancara.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga tahapan menurut Miles dan Huberman, yakni reduksi data, pemaparan data, dan penarikan kesimpulan (Jarmitia et al., 2016). Analisis data merupakan pengaturan secara sistematis hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru (Bachri & S, 2019).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini menjelaskan tentang implementasi pendidikan inklusi di SMA 6 Mataram yang merupakan salah satu sekolah Inklusi Kota Mataram dan problematika yang dihadapi oleh sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Para narasumber menjelaskan dan memaparkan terkait dengan implementasi pendidikan inklusi di SMAN 6 Mataram sebagai berikut.

Konteks Pendidikan Inklusi di Kota Mataram

Pendidikan yang bermutu merupakan hal yang utama dalam membangun negara yang berkembang dalam bersaing dengan negara lain untuk menjadikan dirinya sebagai negara maju. Pemerataan pendidikanpun sangat dipandang penting karena merupakan tujuan sebuah negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (Dalyono & Agustina, 2016). Secara tersirat negara berkewajiban dalam memberikan hak untuk seluruh warga negara dalam menikmati pendidikan yang layak tanpa terkecuali yang tergolong sebagai penyandang disabilitas.

Didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan perihal tentang jaminan pendidikan bagi penyandang disabilitas (Aghniya, 2020). Begitu pula dalam kebijakan peraturan gubernur NTB Nomor 2 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pendidikan Inklusi dimana seluruh sekolah yang ada di Kabupaten atau Kota di provinsi Nusa Tenggara Barat berkewajiban untuk penyelenggaraan pendidikan inklusi. Selain itu dalam pasal 1 ayat 8 menyebutkan bahwa pendidikan inklusi itu memberikan peran kepada semua peserta didik dalam satuan iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang, sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental, sehingga sekolah merupakan miniatur masyarakat (NTB, 2016).

Ditegaskan kembali dalam peraturan daerah Kota Mataram No 6 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dijelaskan dalam pasal 1 ayat 10 menerangkan bahwa Pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya (NTB, 2016). Dari seluruh peraturan tersebut memeberikan pemahaman kepada kita bahwa sekolah harus menjadi rumah bagi seluruh elemen masyarakat yang ingin mengenyam pendidikan tanpa terkecuali. Saat ini SMA 6 Mataram yang menjadi satu sekolah rujukan pendidikan inklusi di Kota Mataram.

Implementasi Pendidikan Inklusi di SMAN 6 Mataram

Peserta Didik Difabel

Peserta didik ialah setiap manusia yang sepanjang hayatnya selalu berada dalam perkembangan, jadi bukan hanya anak-anak yang sedang dalam pengasuhan dalam pengasihan orang tuanya, bukan pula hanya anak-anak dalam usia sekolah, tetapi mencakup



seluruh manusia baik sebagai individu maupun demi terselenggaranya kegiatan pembelajaran yang menyenangkan bagi guru dan juga bagi peserta didik (Harahap, 2017). Dalam pengertian yang lain peserta didik Siswa merupakan komponen utama dalam pendidikan dimana siswa menjadi objek dan subjek pendidikan. Pembelajar adalah setiap orang yang dipengaruhi apakah pengaruh tersebut berasal dari seseorang atau dari sekelompok orang yang terlibat dalam menjalankan pendidikan (Hidayat, 2010).

Dalam sekolah inklusi, pendidikan tidak hanya diikuti oleh peserta didik reguler akan tetapi diikuti peserta didik difabel (Latifah, 2020). Anak difabel adalah anak yang memiliki kelainan atau perbedaan dengan anak pada umumnya, baik dari segi fisik, mental, emosional, sosial, atau kombinasi dari beberapa karakteristik ini yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam mencapai perkembangan yang optimal sehingga menyebabkan mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus untuk mencapai perkembangan yang optimal dengan layanan pendidikan yang diberikan berupa khusus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan (Widiastuti, 2019).

Sebagai dasar untuk mengetahui latar belakang dan disabilitas yang dialami maka diadakan asesmen atau identifikasi. Asesmen adalah identifikasi anak dengan disabilitas untuk mengetahui kondisi anak, apakah mengalami disabilitas atau tidak baik fisik, intelektual, sosial, emosional dan sensorik neurologis dalam perkembangan dan pertumbuhannya (Hamzah et al., 2020). Identifikasi sangat penting bagi calon peserta didik khususnya sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi untuk mengetahui anak tergolong disabilitas atau tidak dan yang terpenting adalah dengan hasil asesmen akan bisa memberikan layanan pendidikan yang tepat untuk siswa difabel.

SMAN 6 Mataram dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi pada tahapan awal penerimaan peserta didik baru, sekolah menyelenggarakan asesmen bagi peserta didiknya melalui kerjasama dengan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tepatnya berada di Selagalas bagi yang tergolong disabilitas. Hasil asesmen tersebut diperuntukkan sebagai bentuk pertimbangan yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam menentukan jenis layanan pendidikan yang tetap sasaran agar nantinya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kemampuan siswa difabel.

Secara umum SMAN 6 Mataram melakukan asesmen dengan baik. Semua calon peserta didik yang telah memenuhi syarat akan mendapatkan rekomendasi pihak rumah sakit dengan penandatanganan surat kesanggupan mengikuti pembelajaran. Selain itu sekolah menerima siswa difabel dengan rekomendasi dari sekolah sebelumnya dengan bukti perkembangan anak selama sekolah. Diterimanya semua siswa difabel merupakan bentuk kepedulian yang sangat tinggi dari pihak sekolah. Selain itu penerimaan juga merupakan rangka untuk menciptakan sekolah inklusi yang bisa memberikan layanan pendidikan bagi semua peserta didik terkhusus siswa difabel. Hal ini sejalan dengan penyampaian dari Dadang Garnida "sekolah inklusi memang harus memberikan kesempatan dan peluang bagi anak dengan disabilitas untuk bisa diterima dan mengikuti pendidikan di sekolah terdekat (Garnida, 2018).

Asesmen utama digunakan untuk mengetahui latar belakang dan jenis disabilitas yang dialami oleh siswa, selain itu hasil dari asesmen juga merupakan hal yang sangat dibutuhkan sekolah dan guru sebagai penentu jenis layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan siswa difabel. Pada saat penelitian ini dilaksanakan diketahui terdapat 4 siswa difabel yang terdiri dari dua siswa difabel netra, satu siswa tuna grahita, dan satu siswa autisme. Hasil dari asesmen, sekolah menerima siswa difabel yang merupakan sebuah apresiasi, upaya membuka akses, dan memberi kesempatan bagi seluruh siswa yang akan melanjutkan jenjang pendidikan lebih khusus lagi untuk memperoleh hak pendidikan sesuai yang



ditetapkan oleh Undang-Undang No.8/2016 tentang Penyandang Disabilitas menjamin adanya kesempatan yang sama bagi difabel pada semua aspek kehidupan, termasuk hak mendapatkan layanan pendidikan yang layak pada semua jenjang pendidikan dan jenis keilmuan (Andayani & Afandi, 2019).

Guru

Faktor utama keberhasilan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi adalah guru. Guru memiliki peran yang sangat fundamental dalam proses pemberian layanan bagi siswa disabilitas. Semua sekolah terlebih sekolah yang diberikan label inklusi harus menyiapkan tenaga pendidik yang memiliki profesionalitas yang tinggi terlebih pada kemampuan dan keahlian yang berhubungan dengan layanan pendidikan bagi siswa disabilitas sesuai dengan pernyataan bahwa pendidikan inklusi memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan kompetensi sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki berdasar pada karakteristik masing-masing peserta didik (Anggriana & Trisnani, 2016).

Pada sekolah inklusi, guru mengambil tugas untuk memberikan pendidikan dan pengajaran kepada siswa difabel yang disebut Guru pendamping khusus (GPK) yang berperan dalam melaksanakan tugas pendampingan kepada siswa difabel disetiap sesi pembelajaran berlangsung. Tugas GPK antara lain yaitu melakukan identifikasi, asesmen dan penyusunan program pembelajaran individu (PPI), kemudian merancang dan melakukan program khusus dan memodifikasi bahan ajar (Indriawati, 2013). Semua itu dilakukan dengan melalui kerjasama dengan guru kelas, guru BK, tenaga ahli seperti psikolog, dan orang tua. Pelaksanaan pembelajaran di kelas, Guru dan guru pendidikan khusus membutuhkan kolaborasi dalam menjalankan pengajaran di kelas. Hal ini diperuntukkan untuk membangun pembelajaran yang efektif bagi siswa (Amalia & Kurniawati, 2021).

SMAN 6 Mataram sebagai sekolah inklusi tidak memiliki guru pendamping khusus (GPK), tetapi sekolah menyediakan guru inklusi yang merangkap sebagai guru mata pelajaran. Peran dari guru pendamping khusus (GPK) diganti dengan guru inklusi dikarenakan sekolah merasa sudah mampu untuk memberikan pelayanan dalam mengajar untuk *setting* kelas inklusi. Sekolah memberikan sosialisasi dan pelatihan selama 1 tahun bagi guru sebagai sarana untuk berhadapan dengan siswa disabilitas. Namun guru inklusi mengakui bahwa mereka masih kurang dalam pelatihan untuk memberikan program layanan bagi siswa difabel. Guru sangat mengharapkan adanya pelatihan yang berkelanjutan agar nantinya guru semakin profesional dalam mengajar siswa difabel.

Permasalahan disetiap sekolah inklusi biasanya terbilang sama yaitu pihak pemerintah daerah menuntut setiap sekolah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi, tetapi semua itu tidak sejalan dengankompetensi yang dimiliki guru. Seharusnya pihak pemerintah harus mengambil andil yang besar guna memberikan dukungan bagi sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi. Maka dari itu, pelatihan bagi guru dalam meningkatkan keterampilan dalam mengajar di sekolah inklusi sangat diperlukan terlebih lagi guru tanpa latar belakang pendidikan khusus untuk siswa difabel (Damayanti et al., 2017). Dalam penelitian yang lain disebutkan bahwa pelatihan pada guru pendidikan inklusi disarankan diberikan pada masa magang sehingga guru tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman yang minim (Musyafira & Hendriani, 2021). Disamping itu pemerintah daerah dan dinas pendidikan harus mengusahakan pemberian bantuan bagi sekolah-sekolah yang sudah mendeklarasikan sebagai sekolah inklusi berupa guru pendamping khusus (GPK) mengingat permasalahan tidak hanya perihal pelatihan guru melainkan ketidaktersediaannya guru pendamping khusus di sekolah menjadi masalah. Hal tersebut merupakan salah satu



bagian penting untuk mengupayakan pendidikan yang layak bagi siswa terlebih siswa penyandang disabilitas.

Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah inklusi, maka sarana dan prasarana sangat dibutuhkan untuk *setting* sekolah yang ramah terhadap siswa difabel. Dukungan dalam bentuk itu akan menciptakan akses bagi siswa difabel dalam beraktifitas baik diluar maupun di dalam ruangan. Aksesibilitas memberikan kesempatan bagi difabel untuk dapat melakukan kegiatannya dengan mandiri sehingga dapat berpartisipasi secara penuh dan berinteraksi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan (Buana, 2019), terlebih lagi sekolah sebagai rumah kedua bagi siswa difabel dalam mengakses pendidikan maka sangat penting sarana dan prasarana yang memadai.

SMAN 6 Mataram telah mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana bagi seluruh kegiatan pendidikan di sekolah. Sekolah sendiri saat ini telah membangun ruang inklusi yang dijadikan sebagai ruang untuk beraktifitas diluar jam pelajaran. Ruang tersebut juga digunakan untuk meletakkan barang-barang yang membantu siswa difabel dalam pembelajaran di kelas. Karena siswa difabel disekolah kebanyakan tergolong difabel netra maka ruangan tersebut diisi oleh buku bacaan *braille*, Al-Qur'an *braille*, alat peraga pembelajaran, alat musik, dan alat olahraga. Disamping itu sekolah juga sudah memiliki akses fisik untuk difabel seperti jalan yang timbul, raling sebagai tempat pegangan yang diletakkan di lantai yang menanjak, penggunaan ram untuk menggantikan anak tangga yang menanjak, dan keadaan lantai yang tidak lebih tinggi dengan yang lain antara satu ruangan dengan ruangan lain. Secara umum sarana dan prasarana bagi siswa difabel belum terpenuhi, masih banyak kekurangan yang dimiliki sekolah. Untuk itu, perlu adanya sinergisitas antara sekolah dengan dinas pendidikan dan pemerintah daerah dalam mengupayakan pemenuhan akses bagi siswa difabel di sekolah.

Lingkungan Sekolah

Dalam *setting* sekolah inklusi, lingkungan pendidikan sangat berpengaruh dalam proses pembentukan budaya inklusi. Pembentukan budaya inklusi ini didasarkan oleh pemahaman dan pemaknaan tentang makna pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi merupakan pendidikan dimana sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial emosional, linguistik atau kondisi lainnya termasuk anak-anak penyandang disabilitas, dan berbakat (Arum et al., 2020). Dalam pendapat lain disebutkan bahwa tujuan pendidikan inklusi adalah untuk menghilangkan eksklusi sosial yang merupakan konsekuensi dari sikap dan tanggapan terhadap keragaman ras, kelas sosial, suku, agama, gender dan kemampuan (Stanley J. Vitello, 2013). Hal tersebut dimaksudkan agar warga sekolah tanpa terkecuali siap dan menerima seorang siswa dengan penyandang disabilitas sebagai warga sekolah yang memiliki hak yang sama dengan siswa yang lain. Disamping itu dalam pendidikan inklusi, semua anak belajar dan memperoleh dukungan yang sama dalam proses pembelajaran dengan anak-anak regular. Apabila ada kegagalan dalam belajar, maka kegagalan itu adalah kegagalan sistem. Dalam hal ini maka lingkungan sekolah baik kepala sekolah, guru, siswa, dan *stakeholder* lainnya harus mengetahui dan memahami makna dari pendidikan inklusi.

Dalam pelaksanaan pendidikan inklusi di SMAN 6 Mataram, kepala sekolah setiap tahunnya selalu mengadakan sosialisasi baik kepada guru maupun seluruh warga sekolah lainnya tentang pendidikan inklusi. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman agar warga sekolah tidak lagi mempermasalahkan terkait siswa difabel yang menjadi bagian sebagai warga sekolah. Maka disaat itu juga semua mengambil bagian yang terbaik agar tercipta suasana kondusif, nyaman dan ramah terhadap siswa difabel. Hal

tersebut dilakukan dengan harapan dapat memberikan energi positif kepada siswa difabel karena merasa diterima dan dihargai oleh seluruh warga sekolah tanpa memandang kondisi siswa disabilitas.

Pelaksanaan Pembelajaran

Pembelajaran bagi siswa difabel adalah bagian dari proses pelayanan yang dilakukan oleh sekolah guna memenuhi hak pendidikan. perencanaan pembelajaran merupakan kegiatan mengintegrasikan kemampuan kecakapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta penguasaan terhadap teknologi yang mengacu kepada karakteristik (usia, sosial budaya, dan kebutuhan individu) (Limbong et al., 2019). Sehingga dengan adanya pelaksanaan pembelajaran yang baik dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan guru dalam proses mengajar.

Dalam *setting* sekolah inklusi perencanaan pembelajaran dirancang oleh guru kelas, guru pendamping khusus, tenaga profesional dengan melakukan kolaborasi. Bentuk perencanaan pembelajaran untuk siswa difabel berbeda dengan peserta didik reguler. Untuk perencanaan pembelajaran bagi peserta didik reguler disebut RPP (rancangan pelaksanaan pembelajaran), namun untuk siswa difabel disebut PPI (program pembelajaran individual). PPI diciptakan untuk menyesuaikan pembelajaran yang lebih spesifik dengan mengikuti karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda setiap individu (Alfaaroqi & Khoiruddin, 2020). Selain PPI sebagai program pembelajaran maka kurikulum juga tidak terlepas dari proses pembelajaran. Dua komponen ini sangat mempengaruhi terpenuhi atau tidaknya kebutuhan siswa difabel dalam pembelajaran (Holifurrahman, 2020).

SMAN 6 Mataram dalam pelaksanaan pembelajaran tidak menggunakan PPI (program pembelajaran individu) dikarenakan adanya guru pendamping khusus (GPK) sebagai pembantu pemberian layanan pendidikan. Hal tersebut mengakibatkan siswa difabel terkadang mengalami hambatan dalam proses pembelajaran khususnya pembelajaran bahasa dan matematika. Meskipun sekolah tidak menggunakan PPI akan tetapi sekolah menyediakan program pendukung yang diperuntukkan untuk seluruh siswa difabel yaitu layanan pembelajaran tambahan. Layanan tambahan ini dilakukan dengan melakukan konfirmasi kepada guru mata pelajaran tentang mata pelajaran yang ingin dikonsultasikan. Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan belajar kepada siswa difabel yang mengalami kesulitan dalam belajar dikelas. Layanan tambahan ini dilakukan di ruang inklusi yang sudah disediakan sekolah. Guru juga menerapkan kurikulum modifikasi sebagai bantuan bagi siswa difabel dalam mengatasi hambatan belajar dan upaya untuk mengembangkan potensi siswa difabel dalam *setting* kelas inklusi. Permasalahannya adalah tidak semua guru melakukan modifikasi kurikulum bagi siswa difabel dikarenakan guru merasa kesulitan dalam mengatur jadwal, kesiubikan pribadi diluar jam sekolah, dan kurangnya pelatihan terkait bagaimana melakukan modifikasi kurikulum yang aksesibel bagi siswa.

Hambatan dalam Implementasi Pendidikan Inklusi di SMAN 6 Mataram

Terdapat berbagai hambatan dalam penyelenggaraan sekolah inklusi diantaranya adalah kurangnya banyaknya tantangan dan hambatan yang dialami oleh beberapa negara jika diurutkan dari yang terbanyak yaitu: kurangnya pelatihan guru, sikap negatif terhadap disabilitas, pemahaman guru tentang disabilitas dan identifikasi disabilitas, kurangnya pembedaan instruksi, hambatan dalam aksesibilitas, kesalahan dalam pembuatan kebijakan, kebijakan institusional yang kurang memahami disabilitas, dan jumlah kelas yang besar, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap disabilitas, sumber daya yang terbatas, keterbatasan financial, kurangnya kerjasama antar guru dan antar elemen masyarakat, kecemasan guru, dan permasalahan pada keterlibatan orangtua dalam pendidikan anak dengan disabilitas, kondisi alam yang kurang bersahabat, dan kekhawatiran akan prestasi siswa dengan disabilitas (Sari & Hendriani, 2021).



Hambatan yang dihadapi SMAN 6 Mataram dalam menyelenggarakan pendidikan Inklusi adalah kurangnya pelatihan guru, kurangnya sumber daya dalam melaksanakan pendidikan inklusi adalah tidak adanya dukungan secara langsung dari pemerintah daerah baik berupa dukungan fisik maupun operasional, dikarenakan sekolah ini menerima siswa difabel jauh sebelum adanya kebijakan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah atau penunjukan sekolah sebagai sekolah inklusi. Kurangnya sarana dan prasarana menjadikan sekolah monoton dalam melakukan tugasnya sebagai sekolah inklusi. Kurangnya Guru Pendamping Khusus (GPK) dan tenaga profesional dalam membantu penanganan siswa difabel juga menjadi kendala yang utama dikarenakan difabel yang diterima saat ini tidak hanya dari difabel netra melainkan ada difabel grahita dan juga autisme. Kurangnya pelatihan bagi guru dalam memberikan pelayanan bagi siswa difabel. Permasalahan lainnya adalah siswa difabel kesulitan dalam mengakses pembelajaran di mata pelajaran matematika, seni budaya, penjasokes, dan juga prakarya.

Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari temuan penelitian ini bahwa implementasi pendidikan inklusi di SMAN 6 Mataram berjalan dengan baik. Pelaksanaan ini berjalan dengan baik dikarenakan sekolah telah melakukan sosialisasi kepada seluruh guru dan orang tua. Selain itu, sekolah menyediakan akses bagi seluruh siswa difabel dengan adanya pembelajaran individu atau tambahan, modifikasi kurikulum untuk seluruh difabel, fasilitas belajar, sosialisasi pembelajaran buku *braille* untuk guru dan juga pemberian pendampingan kepada siswa difabel dalam ujian. Adapun kendala yang dialami adalah kurangnya dukungan secara langsung dari pemerintah, tenaga profesional dan juga dalam masalah pembelajaran seperti matematika, seni budaya, penjasokes, dan juga prakarya.

Saran

Adapun saran berdasarkan temuan penelitian ini adalah *pertama* bagi sekolah yaitu dalam perihal penyusunan kurikulum diharapkan sekolah melibatkan secara aktif guru kelas, tenaga profesional, maupun Guru Pendamping Khusus (GPK) karena mereka lebih berkompeten dalam mengetahui kompetensi, perkembangan, dan kebutuhan siswa sehingga dalam perencanaan pembelajaran dan proses belajar mengajar dapat dilakukan dengan maksimal, berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru seperti mengadakan pelatihan-pelatihan secara bertahap yang nantinya berhubungan dengan aktifitas pembelajaran kolaboratif. *Kedua* yaitu bagi stakeholders harus saling bersinergi dengan stakeholders yang lain serta memiliki persepsi yang sama terkait bagaimana menciptakan sekolah inklusi yang baik. *Ketiga*, yaitu bagi pemerintah daerah perlu menempatkan GPK dan tenaga profesional disetiap sekolah inklusi yang ada di Mataram dengan tujuan untuk memfasilitasi sekolah dalam upaya memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi kemampuan yang dimiliki serta menjalankan kebijakan pendidikan inklusi dengan semestinya. Semua itu akan memberikan jalan bagi semua anak-anak khususnya penyandang disabilitas dalam mengakses sekolah. *Keempat* yaitu bagi peneliti selanjutnya dapat merefleksikan lebih dalam penerapan pendidikan inklusi dimanapun melakukan penelitian.

Daftar Pustaka

Afifah, W., & Hadi, S. (2018). HAK PENDIDIKAN PENYANDANG DISABILITAS DI JAWA TIMUR. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1793>



- Aghniya, S. L. (2020). Strategi Pembelajaran Jarak Jauh Untuk Siswa Berkebutuhan Khusus Di Tengah Pandemi. *Jurnal Pendidikan Inklusi*, 8.
- Alfaaroqi, K. U., & Khoiruddin, M. A. (2020). Implementasi Pendidikan Inklusif Dan Kendalanya Di Sdn Betet 1 Kota Kediri (Implementation of Inclusive Education and Its Control in Sdn Betet 1 Kota Kediri). *Jurnal Ilmiah Psikologi*, 22(1), 1–16.
- Alfian. (2013). Pendidikan Inklusif di Indonesia. *Edu-Bio*, 4(4).
- Amalia, N., & Kurniawati, F. (2021). Studi Literatur: Peran Guru Pendidikan Khusus di Sekolah Inklusi. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran*, 7(2), 361-371. doi:<https://doi.org/10.33394/jk.v7i2.3730>
- Andayani, A., & Afandi, M. (2019). Pemberdayaan dan Pendampingan Komunitas Penyandang Disabilitas Dalam Mengakses Pendidikan Tinggi. *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 16(2). <https://doi.org/10.14421/aplikasia.v16i2.1178>
- Anggriana, T. M., & Trisnani, R. P. (2016). Kompetensi Guru Pendamping Siswa Abk Di Sekolah Dasar. *Jurnal Konseling Gusjigang*, 2(2), 157–164. <https://doi.org/10.24176/jkg.v2i2.702>
- Angreni, S., & Sari, R. T. (2020). IDENTIFIKASI DAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSI BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SEKOLAH DASAR SUMATERA BARAT. *AULADUNA: Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 7(2). <https://doi.org/10.24252/10.24252/auladuna.v7i2a4.2020>
- Arum, S. K., Widyastono, H., & Sunardi, B. (2020). Pendidikan Inklusi Sebagai Solusi Pendidikan Untuk Semua (Penerapan Pendidikan Inklusi di SDN Bromantakan 56 Surakarta). *BEST Journal (Biology Education, Sains and Technology)*, 3(1). <https://doi.org/10.30743/best.v3i1.2487>
- Bachri, & S, B. (2019). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Teknologi Pendidikan*, 10.
- Barsihanor, B., & Anindia Rosyida, D. (2019). Implementasi Pendidikan Inklusi Pada Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Firdaus Banjarmasin. *Jurnal Tarbiyatuna*, 10(2). <https://doi.org/10.31603/tarbiyatuna.v10i2.2712>
- Buana, I. K. S. (2019). Aksesibilitas Sebagai Bentuk Kemandirian bagi Difabel dalam Menggunakan Fasilitas Pelayanan Publik pada Perbankan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7.
- Dalyono, B., & Agustina, D. A. (2016). Guru profesional sebagai faktor penentu pendidikan bermutu. *Polines*, 2.
- Damayanti, T., Hamdan, S. R., & ... (2017). KOMPETENSI GURU DI DALAM PROSES PEMBELAJARAN INKLUSI PADA GURU SD NEGERI DI KOTA BANDUNG. *Schema: Journal of ...*
- Darma, I. P., & Rusyidi, B. (2015). Pelaksanaan Sekolah Inklusi Di Indonesia. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 223–227. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.13530>
- Fathimatul Zahrol F, N. Z. D. (2015). IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSI DI KOTA KEDIRI: STUDI KASUS DI SMP YBPK KEDIRI. *EMPIRISMA*, 24(2). <https://doi.org/10.30762/empirisma.v24i2.27>
- Firman. (2020). May 2020. *Oncology*, 1(3405), 485–491. <https://doi.org/10.46883/onc.3405>
- Garnida, D. D. (2018). *Pengantar Pendidikan Inklusif* (D. Sumayyah (Ed.); 2nd ed.). PT.Refika Aditama.
- Hamzah, S. I., Djuko, R. U., & Juniarti, Y. (2020). Asesmen terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (Abk). *Jambura Early Childhood Education Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.37411/jecej.v2i1.120>

- Harahap, M. (2017). Esensi Peserta Didik dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 1(2). [https://doi.org/10.25299/althariqah.2016.vol1\(2\).625](https://doi.org/10.25299/althariqah.2016.vol1(2).625)
- Hidayat, A. dan M. (2010). *Pengelolaan Pendidikan*. Pustaka Educa.
- Holifurrahman, H. (2020). Kurikulum Modifikasi dalam Praktik Pendidikan Inklusif di SD Al-Firdaus. *INKLUSI*, 7(2). <https://doi.org/10.14421/ijds.070205>
- Indriawati, P. (2013). Implementasi Kebijakan Tugas Guru Pembimbing Khusus pada Pendidikan Inklusif di SD Negeri se-Kecamatan Junrejo Batu. *Jurnal Kebijakan Dan Pengembangan Pendidikan*, 1(1), 50.
- Jarmitia, S., Sulistyani, A., Yulandari, N., Tatar, F. M., Santoso, H., Jarmitia, S., Sulistyani, A., Yulandari, N., Tatar, F. M., & Santoso, H. (2016). the Relationship Between Social Support and Self Confidence of Persons With Physical Disability in Special Education Schools in. *Psikoislamedia*, 1(April).
- Kemendiknas. (2010). *Modul Pelatihan Pendidikan Inklusif*. Kemendiknas.
- Kusnia, N. (2019). Sumber Daya Dalam Implementasi Kebijakan pendidikan Inklusi di SDN Betet 1 Kediri. *Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan*, 3(1). <https://doi.org/10.26740/jdmp.v3n1.p25-30>
- Latifah, I. (2020). Pendidikan Segregasi, Mainstreaming, Integrasi dan inklusi, apa bedanya? *JURNAL PENDIDIKAN*, 29(2). <https://doi.org/10.32585/jp.v29i2.676>
- Limbong, I., Munawar, M., & Kusumaningtyas, N. (2019). Perencanaan pembelajaran paud berbasis steam (science, technology, eingeneering, art, mathematic). *Seminar Nasional PAUD 2019*.
- Lukitasari, S. W., Sulasmono, B. S., & Iriani, A. (2017). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 4(2). <https://doi.org/10.24246/j.jk.2017.v4.i2.p121-134>
- Ma'arif, M. A. (2017). Manajemen Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam. *At Ta'lim: Jurnal Pendidikan*, 3(1).
- Michael, D. (2020). Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi bagi Penyandang Disabilitas di Universitas Brawijaya. *Jurnal HAM*, 11(2). <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.201-217>
- Musyafira, I., & Hendriani, W. (2021). Sikap Guru Dalam Mendukung Keberhasilan Pendidikan Inklusi. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran*, 7(1), 75-85. doi:<https://doi.org/10.33394/jk.v7i1.3105>
- NTB, S. P. (2016). *Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat*.
- Saadati, B. A., & Sadli, M. (2019). IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSI BERBASIS PENGEMBANGAN DIRI DI SEKOLAH ALAM JOGJA GREEN SCHOOL. *El Midad*, 11(2). <https://doi.org/10.20414/elmidad.v11i2.1898>
- Sari, C. N., & Hendriani, W. (2021). Hambatan pendidikan inklusi dan bagaimana mengatasinya: Telaah kritis sistematis dari berbagai negara. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 9(1). <https://doi.org/10.22219/jipt.v9i1.14154>
- Sastradharja, E. J., MS, F., & Sutarya, M. (2020). Pendidikan Inklusi Di Perguruan Tinggi. *Alim | Journal of Islamic Education*, 2(1). <https://doi.org/10.51275/alim.v2i1.172>
- Shofa, M. F. (2018). Implementasi Manajemen Pendidikan Inklusi di PAUD Inklusi Saymara Kartasura. *At-Tarbawi: Jurnal Kajian Kependidikan Islam*, 3(2). <https://doi.org/10.22515/attarbawi.v3i2.1337>
- Sistem "SMART" dalam Implementasi Pendidikan Inklusi. (2005). *JPK: JURNAL PENDIDIKAN KHUSUS*, 1(2). <https://doi.org/10.21831/jpk.v1i2.6005>



- Stanley J. Vitello, D. E. Mi. (2013). *Inclusive schooling: National and international perspectives*. New Jersey: Lawrence Erlbaum.
- Statistik, B. P. (2020). *Potret Pendidikan Indonesia Statistik Pendidikan 2020*. Badan Pusat Statistik.
- Suparno, S., Praptiningrum, N., & Purwandari, E. (2019). Dampak implementasi pendidikan inklusi terhadap aspek akademik siswa lamban belajar (slow learner). *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*, 11(1). <https://doi.org/10.21831/jpipfip.v11i1.23795>
- Wati, E. (2014). Manajemen Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar Negeri 32 Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Didaktika*, 14(2), 368–378. <https://doi.org/10.22373/jid.v14i2.508>
- Widiastuti, N. L. G. K. (2019). Karakteristik dan Model Layanan Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar. *Jurnal Kajian Pendidikan Widya Accarya FKIP Universitas Dwijendra*, 53(9).